

# #INDONESIAIGELAP

KENYANG  
KAGAK  
BEGO  
IYA

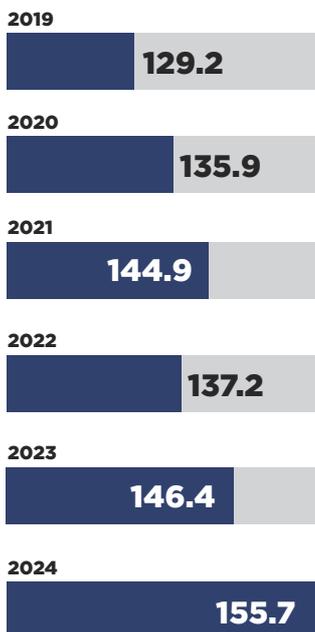
## 13 POIN TUNTUTAN MASSA #INDONESIAIGELAP

1. Ciptakan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah dan wujudkan reforma agraria sejati, karena PSN sering menjadi alat perampasan tanah rakyat.
3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang hanya menjadi alat pembungkaman bagi kritik di kampus dan lingkungan akademik.
4. Hapuskan multifungsi ABRI, karena keterlibatan militer dalam sektor sipil dapat menimbulkan represi dan menghambat demokrasi.
5. Sahkan Undang-Undang Masyarakat Adat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tanah dan kebudayaan mereka.
6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengancam kepentingan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi program makan bergizi gratis agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk kesejahteraan akademisi dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
9. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan Perppu perampasan aset guna memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi.
10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dapat menguatkan imunitas aparat dan militer.
11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih untuk mengatasi pejabat boros dan bermasalah.
12. Tolak revisi Peraturan DPR tentang tata tertib yang berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan.
13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Aksi ini adalah panggilan untuk mengawal pemerintahan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**T**agar Indonesia Gelap atau #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu menggemparkan media sosial di Indonesia. Bahkan untuk #IndonesiaGelap, aksi nyata turun ke jalan digeber mahasiswa di berbagai kota pada Senin (17/2/2025). Aksi ini menyoroti berbagai permasalahan dalam pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membacakan 13 tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan itu mulai dari isu pendidikan hingga rombak Kabinet Merah Putih. Sementara di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, demo berakhir ricuh. Aparat kepolisian bahkan membubarkan massa dengan water cannon. Meski dengan tagline berbeda, ratusan pelajar tingkat sekolah menengah atas (SMA) di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan juga berunjuk rasa kepada pemerintah. Mereka kembali melakukan aksi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski belum dipastikan kebenarannya, pegiat media sosial, Maudy Asmara menjadi perhatian karena mengunggah foto ditemukannya peluru di lokasi aksi pelajar Papua tersebut. Istana langsung membantah tuntutan di sektor pendidikan. Ditegaskan tidak ada pemotongan terhadap biaya operasional perguruan tinggi, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, maupun beasiswa. Namun terkait desakan MBG dievaluasi, revisi UU Minerba dibatalkan hingga penghapusan multifungsi ABRI belum direspon oleh pemerintahan Prabowo.

# Mulai Maret, Pengusaha Wajib Parkir Devisa Ekspor di RI 100 Persen Setahun

## CADANGAN DEVISI INDONESIA (US\$ MILIAR)



Presiden Prabowo Subianto menyampaikan konferensi pers terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025. (BPMI).

ditempatkan di perbankan Indonesia relatif stabil. Bahkan, penempatan DHE SDA sudah melebihi batas minimal yang ditetapkan dari aturan yaitu sebesar 30 persen.

"Posisi dari devisa hasil ekspor yang diletakkan di dalam perbankan kita itu relatif stabil. Kalau minimum tadinya 30 persen di dalam data, yang ada adalah bahkan mencapai 37 sampai 42 persen. Jadi ini menggambarkan mereka sudah melebihi dari yang 30 persen. Sekarang dengan 100 persen, terutama untuk yang SDA batubara, CPO, dan nikel adalah tiga komoditas yang paling besar peranannya di dalam menghasilkan ekspor dan devisa kita," kata Menkeu dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (17/2/2025).

Untuk itu, Menkeu menegaskan Kementerian Keuangan akan melakukan koordinasi bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bank Indonesia agar eksportir dan produsen tidak terdisrupsi. Kebutuhan penukaran rupiah, pembayaran dalam bentuk valuta asing untuk kewajiban pajak, pembayaran dividen dan pengadaan barang yang tidak diproduksi di Indonesia, serta pembayaran kembali atas pinjaman eksportir dipastikan tetap aman dan tidak terganggu.

"Tidak ada alasan bahwa perusahaan kemudian karena adanya retensi 100 persen 12 bulan kemudian mengalami disrupsi dari sisi keuangan maupun kewajiban-kewajiban mereka," ujar Menkeu.

Adapun Menkeu juga menyampaikan kebijakan tersebut tidak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga dilakukan di beberapa negara di dunia.

"Itu juga menjadi salah satu bagian untuk kita terus meningkatkan bagaimana hasil dari bumi, air, dan seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia betul-betul bisa masuk ke dalam Indonesia dan bisa memper-

kuat perekonomian Indonesia. Karena sistem perbankan dan sistem keuangan kita juga akan terus diperkuat sehingga mereka juga mampu untuk terus memberikan services kepada para eksportir tersebut," kata Menkeu.

### 3 Instrumen Baru BI

Bank Indonesia (BI) akan menerbitkan tiga instrumen baru untuk mempermudah eksportir dan perbankan dalam menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) yang masuk ke rekening khusus.

Tiga instrumen tersebut yakni Sekuritas Valas BI (SVBI), Sukuk Valas BI (SUVBI), dan perluasan FX Swap Valas. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan langkah ini diharapkan dapat memperkuat pasar keuangan domestik serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Dari BI, kami juga akan memperluas dan memperbanyak instrumen-instrumen yang eksportir maupun perbankan bisa gunakan untuk menempatkan cadangan devisa. Setelah rekening masuk, dananya bisa ditempatkan," ujar Perry dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Perry mengatakan selama ini eksportir yang menerima devisa hasil ekspor dapat menempatkan dananya dalam deposito valas di bank, yang kemudian bisa dire-depositokan oleh perbankan ke BI dalam bentuk term deposit valas.

Selain itu, eksportir dan perbankan juga dapat menggunakan rekening khusus untuk term deposit sebagai underlying untuk swap valas, yaitu menukar dolar AS ke rupiah dalam transaksi lindung nilai.

Perry mengatakan BI akan menerbitkan SVBI dengan tenor enam, sembilan, dan 12 bulan.

Eksportir yang telah memasukkan devisanya ke dalam rekening khusus

bisa menempatkan dananya di SVBI melalui bank. Instrumen ini juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga eksportir memiliki fleksibilitas jika ingin mencairkan dana lebih cepat.

"Sekuritas Valas BI ini bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi eksportir bisa beli SVBI melalui bank, nanti bisa diperdagangkan yang lain melalui primary market," jelas Perry.

Selain SVBI, BI juga akan menerbitkan SUVBI sebagai instrumen berbasis syariah dengan tenor yang sama, yaitu enam, sembilan, dan 12 bulan. Seperti SVBI, SUVBI juga dapat diperjualbelikan di pasar valas domestik.

"Kalau tadi sekuritas valas ini sukuk, instrumen syariah, sama enam, sembilan, 12 bulan, para eksportir bisa membeli SUVBI," tambahnya.

Selain itu, BI juga akan memperluas instrumen FX Swap Valas, yang memungkinkan eksportir untuk menukar devisa dalam rekening khusus, term deposit, SVBI, atau SUVBI menjadi rupiah sesuai kebutuhan mereka.

"Sehingga dari BI akan jadi lima instrumen; term deposit, SVBI, SUVBI, kemudian sukuk valasnya bisa pakai term deposit, bisa pakai SVBI, bisa SUVBI," jelas Perry.

Instrumen-instrumen baru ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas dan likuiditas bagi eksportir dalam mengelola devisa mereka di dalam negeri.

Jika eksportir membutuhkan rupiah dalam jangka pendek, mereka bisa memilih SUVBI dengan tenor satu bulan. Jika memiliki SVBI enam bulan, tetapi membutuhkan dana lebih cepat, mereka bisa menjualnya di pasar sekunder.

"Dengan ini, dana yang masuk ke rekening khusus bisa lebih banyak berputar di dalam sistem keuangan, pasar uang, pasar valas, dan bermanfaat bagi perekonomian," jelas Perry lebih lanjut.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Hendra Sinadia mengungkapkan bahwa salinan PP 8/2025 belum diterima dan baca lebih detail.

"Namun, pada prinsipnya penjelasan Pak Presiden Prabowo cukup melegakan, karena tetap memberi ruang kepada pelaku usaha eksportir di 4 sektor SDA tersebut untuk dapat menjaga arus kas perusahaan melalui 5 opsi," kata Hendra. (wid,rls,ant/dya)

## RUU Minerba Disahkan DPR

# Kampus Tak Boleh Kelola Langsung Tambang

**JAKARTA** - Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melanjutkan pembahasan perubahan keempat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Sebanyak delapan atau seluruh fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat membawanya ke sidang paripurna pada Selasa (18/2/2025).

RUU ini memuat per-aturan yang memberikan wewenang bagi universitas untuk mengelola pertambangan. Kesepakatan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan 8 fraksi di DPR RI, yakni PDI-Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, Demokrat, dan PAN.

Kini dalam RUU tersebut Kampus atau Perguruan Tinggi diusulkan hanya menerima manfaat dari izin tambang.

Sementara, kata dia, izin tambang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan ditunjuk oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia usai rapat Baleg yang membahas RUU Minerba di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

"Kemudian khusus untuk perguruan tinggi setelah banyak diskusi kemudian mendengar masukan dari berbagai elemen masyarakat termasuk kampus-kampus, nah, kita akhirnya membuat polanya itu adalah bahwa yang dibeli cara prioritas itu adalah BUMN, BUMD atau Badan Swasta yang ditunjuk oleh pemerintah yang kemudian itu nanti akan dikonekkan dengan perguruan-perguruan tinggi tertentu," kata Doli.

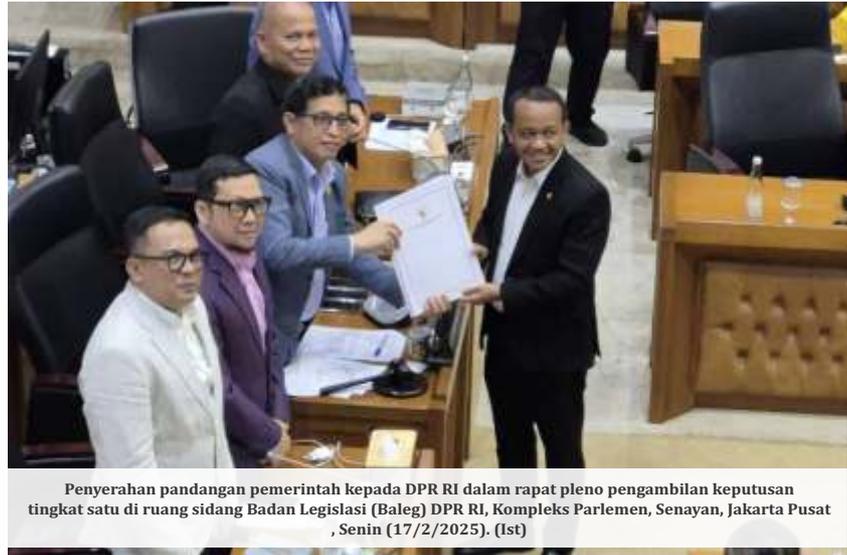
Nantinya, kata dia, kampus tidak langsung mengelola tambang, hanya menerima manfaatnya saja.

"Nanti dibicarakan soal pembagian royaltinya bagaimana. Intinya adalah supaya memang ada supporting ada dana supporting untuk pengembangan dan kemanusiaan dari perguruan tinggi," katanya.

"Penerimaan manfaat jadi penerimaan manfaatnya saja. jadi IUP atau IUPK-nya itu nanti diserahkan kepada BUMN, BUMD, atau Badan Swasta yang ditunjuk oleh pemerintah," sambungnya.

Lebih lanjut, kata dia, nantinya akan dipilih kampus-kampus mana saja yang berhak untuk menerima manfaat tambang tersebut.

"Kemudian nanti dipetakan mana



Penyerahan pandangan pemerintah kepada DPR RI dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu di ruang sidang Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). (Ist)

daerah-daerahnya, lokasi-lokasinya dan kemudian nanti siapa yang mengerjakan itu pilihnya tiga itu BUMN, BUMD atau Badan Swasta yang ditunjuk oleh pemerintah yang kemudian nanti dikonekkan dengan perguruan tinggi yang mau kita bantu," katanya.

Hal itu dibenarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ditegaskan perguruan tinggi tidak diberi izin untuk mengelola tambang guna menghargai dan menjaga independensinya.

"Kami dari pemerintah, setelah melihat perkembangan, mengkaji, dan menghargai, menjaga independensi kampus, maka tidak ada pemberian langsung (izin tambang) kepada kampus," ucap Bahlil dalam konferensi pers setelah menghadiri rapat pleno Baleg DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Yang ada, lanjut dia, adalah pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

"Kalau perusahaan-perusahaan ini punya keinginan untuk beribadah, memberikan dana penelitian, membuat laboratoriumnya, memberikan beasiswa kepada kampus yang membutuhkan, kan nggak ada persoalan," kata Bahlil.

Akan tetapi, pemberian berbagai fasilitas tersebut kepada perguruan tinggi belum menjadi syarat wajib bagi BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta yang mengelola tambang.

Bahlil menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang mencari formulasi yang terbaik agar perguruan tinggi dapat merasakan manfaat dari

pengelolaan tambang.

Ia juga mempertimbangkan keberadaan perguruan tinggi yang tidak mau menerima keuntungan dari pengelolaan tambang.

"Tapi ada di beberapa daerah penghasil tambang, seperti di Maluku Utara, di Kalimantan, di Sulawesi, mereka datang ke saya, meminta agar itu (memberi manfaat untuk kampus) dijadikan sebagai kriteria, sebagai syarat. Tetapi (pembahasan) kita belum sampai ke sana," ucapnya.

### 4 Poin Perubahan

Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Minerba Baleg DPR RI, Martin Manuring menyebutkan bahwa setidaknya ada 9 poin pasal yang disepakati untuk dilakukan perubahan.

"Dalam Rapat Panja tersebut Panja telah menyepakati dan memutuskan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan ke-4 atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara," jelasnya dalam rapat tersebut.

Selain itu, terdapat empat poin materi muatan perubahan RUU tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Pertama, yang memuat kebijakan mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak yaitu: Kooperasi, badan usaha kecil dan menengah (UMKM), badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan (ormas) dan melalui pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

Kedua, memastikan penguatan dan kepastian pasokan bahan baku

### Kesepakatan RUU tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara

1. Perbaiki pasal-pasal yang terkait dengan Putusan MK, yaitu Pasal 17A, Pasal 22A, Pasal 31A, dan Pasal 169A.
2. Pasal 1 angka 16 perubahan mengenai definisi studi kelayakan;
3. Pasal 5 mengenai kewajiban pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.
4. Pasal 35 ayat (5), Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 60 ayat (4) dan ayat (5) terkait Perizinan Berusaha dan Mineral logam dan pemberian dengan cara prioritas WIUP Batubara mengikuti mekanisme sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
5. Pasal 100 ayat (2) terkait pelaksanaan Reklamasi dan pelindungan dampak Pascatambang bagi masyarakat dan daerah, Menteri melibatkan Pemerintah Daerah.
6. Pasal 108 mengenai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan tambang dan masyarakat adat melalui;
  - a. program tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - b. pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang berada di wilayah Pertambangan dalam kegiatan Pertambangan; dan
  - c. program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
7. Pasal 169A memasukkan ketentuan terkait audit lingkungan.
8. Pasal 171B terkait IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan terdapat permasalahan tumpang tindih sebagian atau seluruh WIUP-nya berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Pusat, dicabut dan dikembalikan kepada negara.
9. Pasal 174 ayat (2) terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.

secara berkelanjutan dan efektif, serta efisien. Khususnya bagi badan usaha milik negara yang mengemban usaha yang berorientasi dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Ketiga, mendorong percepatan pengelolaan kegiatan hilirisasi sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional.

Keempat, mewujudkan pemerataan dan keadilan sehingga mencerminkan demokrasi ekonomi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai kesimpulan, Martin menyebut hasil Panja adalah pembahasan dalam rangka pembicaraan tingkat 1 atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. (wid, din, ist, rls/dya)

# KPK Tolak Alasan Praperadilan, Hasto Dipanggil Lagi Pekan Ini



Mantan kader PDIP yang dipecat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sudarsono, melakukan sujud di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/2/2025). Sudarsono melakukan sujud karena praperadilan Hasto ditolak hakim.ist

**JAKARTA-** Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil kembali Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk diperiksa sebagai tersangka pada pekan ini. Surat panggilan segera dikirim.

"Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari penyidik, bahwa betul saudara HK tidak memenuhi panggilannya hari ini sebagai tersangka dan penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kedua kepada yang bersangkutan, masih di pekan ini," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Kantornya,

Jakarta, Senin (17/2/2025) petang.

Tessa mengatakan penyidik tidak menerima alasan yang disampaikan pihak Hasto dalam suratnya hari ini. Kata dia, Praperadilan tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pemeriksaan karena itu merupakan dua hal yang berbeda.

"Ya, karena teman-teman juga sudah sering mendengar ya bahwa proses Praperadilan berbeda dengan

proses penyidikan yang ditangani oleh aparat penegak hukum, baik itu di KPK, di Kepolisian maupun di Kejaksaan," terang Tessa.

"Jadi, penyidik menilai tidak ada alasan yang patut dan wajar untuk tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka hari ini," lanjut juru bicara berlatar belakang penyidik ini.

Lembaga antirasuah seyogyanya memanggil Hasto untuk diperiksa sebagai tersangka pada hari ini. Namun, yang bersangkutan melalui tim hukumnya menyurati penyidik untuk memohon penjadwalan ulang

karena baru saja mendaftarkan permohonan Praperadilan kedua.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Kamis (13/2/2025), hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto menyatakan tidak menerima permohonan Praperadilan Hasto yang memperlumahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangannya penyidikan.

Menurut hakim, seharusnya permohonan dibuat secara terpisah. "Mengadili: Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan Praperadilan pemohon tidak dapat diterima," ucap hakim.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron). Hasto dan Donny belum dilakukan penahanan oleh KPK.

Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Selain suap, Hasto juga dikenakan

pasal perintangannya penyidikan atau obstruction of justice.

## 3 Maret Sidang Praperadilan Lagi

Pengadilan Negeri (PN) Jaksel membenarkan menerima dua permohonan praperadilan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto. Pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto, mengatakan, kedua permohonan itu menggugat status tersangka yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 telah masuk 2 permohonan praperadilan atas nama pemohon Hasto Kristiyanto dengan termohon KPK RI ke kepaniteraan pidana PN Jaksel," kata Djuyamto, dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Adapun sidang pertama kedua permohonan tersebut akan digelar pada 3 Maret mendatang. "Untuk agenda panggilan para pihak," kata Djuyamto. Djuyamto mengatakan, salah satu permohonan Hasto teregister dengan Nomor Perkara Pid.Pra/2025/PN.JKT.SEL.

Melalui permohonan ini, Hasto meminta agar Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 yang menetapkan dirinya sebagai tersangka suap bersama eks kader PDI-P Harun Masiku diuji. (wid,rls,kum/dya)

# Harvey Moeis Lawan Vonis 20 Tahun, Bakal Ajukan Kasasi di Kasus Timah

**JAKARTA-** Perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT) Harvey Moeis dan empat terdakwa lain di kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk 2015-2022 akan mengajukan upaya hukum kasasi.

Mereka tidak terima dihukum lebih berat oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Diketahui, Harvey awalnya divonis 6,5 tahun penjara. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian memvonis Harvey 20 tahun penjara.

"Upaya hukum kasasi pasti kami akan ajukan," ujar kuasa hukum Harvey, Andi Ahmad, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Andi juga menjadi kuasa hukum untuk crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) sekaligus pemilik PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim; Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani; Direktur Utama PT RBT sejak

2018 Suparta; dan Direktur Pengembangan PT RBT Reza Andriansyah.

Andi mengaku belum menerima salinan lengkap putusan pengadilan tingkat banding yang dibacakan pada Kamis, 13 Februari lalu.

"Kami kan sampai sekarang masih mengkaji karena kami belum mendapatkan salinan resmi dari putusan, dan setelah nanti diperoleh yang pasti adalah karena kami rasa putusan ini juga jauh lebih tinggi daripada apa yang sudah diputuskan di awal, dan kami yakin bahwa klien kami sama sekali seharusnya tidak bersalah terhadap dakwaan yang sudah dituntut oleh jaksa penuntut umum, maka yang pasti kami akan menempuh upaya hukum," kata Andi.

Di pengadilan tingkat banding, hukuman Harvey dkk diperberat dua hingga tiga kali lipat dibandingkan di pengadilan tingkat pertama.

Harvey dihukum dengan pidana 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan ditambah uang pengganti Rp420

miliar subsider 10 tahun penjara.

Sejumlah aset Harvey diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) seperti rumah, condominium, mobil mewah, perhiasan, tas bermerek hingga perhiasan dirampas untuk negara.

Sementara Helena Lim divonis 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan ditambah uang pengganti sejumlah Rp900 juta subsider 5 tahun penjara.

Mochtar Riza Pahlevi Tabrani divonis 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan ditambah uang pengganti sejumlah Rp493 miliar subsider 6 tahun penjara.



Harvey Moeis terdakwa kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk 2015-2022.ist

Sedangkan Suparta divonis dengan pidana 19 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan ditambah uang pengganti sejumlah Rp4,57 triliun subsider 10 tahun penjara.

Serta Reza Andriansyah divonis dengan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider 3 bulan kurungan. (wid,rls,ist/dya)

# Godok Aturan THR Ojol, Menaker Janji Ajak Bicara Operator

**JAKARTA**-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan saat ini aturan berkaitan tunjangan hari raya atau THR untuk pengemudi ojek online alias ojol masih dalam tahap pembahasan. Persoalan THR merupakan salah satu tuntutan para pengemudi ojol dalam unjuk rasa pagi ini di Kantor Kemenaker.

"Sekarang (aturan) kami godok, semoga segera ya. Sudah dibahas, tapi belum difinalisasi saja," kata Yassierli saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Senin (17/1/2025).

Yassierli memastikan pembahasan mengenai aturan tersebut juga menyertakan dari pihak pengusaha atau operator ojek online. Ia mengatakan, pemerintah juga mendengarkan aspirasi dari operator ojek online.

"Kami juga dengar aspirasi dari mereka (pengusaha). Tunggu saja beberapa hari ini, semoga saja," ujar Yassierli.

Yassierli mengatakan, dalam pembahasan aturan THR tersebut tidak mempermasalahkan mengenai status pengemudi ojol sebagai mitra. Ia meminta operator ojek online bisa berkolaborasi dengan mitranya.

"Gunakan kesempatan ini untuk pengusaha dengan pengemudi itu kemudian bekerja sama dan bersinergi," kata Yassierli.

Pengemudi ojol sebelumnya berdemo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan hari ini. Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, ada sekitar 100 pengemudi taksi dan ojek online alias ojol yang mengikuti aksi dari rencana 500 hingga 700.

Demo ojol tersebut menuntut adanya pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR oleh aplikasi seperti Gojek, Grab, Maxim, inDrive kepada pengemudi taksi dan ojek online. Tuntutannya adalah permintaan pengemudi menjadi pekerja tetap, pemberian THR satu bulan upah, hingga menolak hubungan kemitraan yang menjanjikan fleksibilitas.

Diketahui, massa dari driver ojek online (ojol) menggelar demo di depan Kementerian Ketenagakerjaan. Massa ojol meminta pembayaran THR dari perusahaan berupa uang, bukan bahan pokok.

"Yang pasti adalah tuntutan kami, bahwa kami harus mendapatkan THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok," ujar Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati kepada wartawan di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (17/2/2025).



Lily ingin mengawal adanya kebijakan terkait pembayaran THR kepada driver ojol. Apalagi, lanjut dia, Wamenaker Immanuel Ebenezer mengatakan driver online harus mendapat THR, baik roda dua maupun roda empat.

"Pak Wamen udah mengeluarkan statement bahwa ojol harus mendapatkan THR, baik roda dua, roda empat, maupun kurir, yang pasti itu. Kami mengawal Pak Menteri dan Pak Wamenaker untuk mewujudkan bahwa kami akan mendapatkan THR tahun ini," katanya.

Adapun pihaknya menyerahkan kepada Kemenaker terkait besaran THR kepada driver ojol. Selain itu, driver ojol juga menuntut penghapusan Aceng dan Slot yang diterapkan aplikasi.

"Itu merugikan driver. Kami merasa diperbudak dengan adanya Aceng dan Slot ini karena tarifnya begitu murah dan ada pengotakan wilayah," tuturnya.

Lebih lanjut, Lily mengakui demo hari ini tak diikuti sejumlah driver ojol lainnya. Dia menyebutkan sejumlah driver ojol takut diputus mitra.

"Terus terang ya, kita belum maksimal karena banyak kawan-kawan yang ketakutan. Satu, bahwa ada ancaman-ancaman dari beberapa aplikasi bahwa mereka ketika ikut demo, mereka akan diputus mitra," ujarnya.

Tak hanya di Jakarta, aksi serupa juga dilakukan di sejumlah daerah seperti Sukabumi, Dumai, Pontianak, dan Pangkal Pinang. Para driver ojol di wilayah ini serempak melakukan "off bid" atau menghentikan aktivitas orderan sebagai bentuk protes massal.

## Tak Ada Payung Hukumnya

Sementara, Pengamat Persaingan Usaha sekaligus Dosen Hukum Ekonomi dan Teknologi Universitas Indonesia Ditha Wiradiputra

menjelaskan berdasarkan regulasi yang ada saat ini, pemberian THR untuk pekerja hanya mengacu Surat Edaran (SE) No.M/2/HK.04/III/2024 tentang THR Keagamaan.

Dia bilang, regulasi tersebut mengatur bahwa hanya pekerja yang memiliki hubungan kerja yang berhak menerima THR.

"Sedangkan pekerja ojol dan angkutan online berdasarkan aturan yang ada sejauh ini bukanlah kategori sebagai pekerja yang memiliki hubungan kerja," ujarnya, Senin (17/2/2025).

Ditha mengungkapkan, praktik di negara lain hampir mirip dengan regulasi yang ada di Indonesia, di mana pekerja online ini diatur lewat hubungan kemitraan bukan hubungan ketenagakerjaan, meskipun terdapat sejumlah tuntutan dari pekerja online untuk mendapatkan hak-hak layaknya pekerja.

"(Jika tuntutan THR bagi driver ojol ini dikabulkan) kemungkinan bakal berdampak cukup besar bagi ekonomi, khususnya bagi perusahaan platform dengan besarnya jumlah mitra yang ada.

Lebih lanjut, Ditha menambahkan, solusi alternatif selain memberikan THR bagi driver ojol adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja online.

"(Caranya) Dengan memberikan sejumlah insentif lebih dari perusahaan platform untuk membantu pekerja menghadapi hari raya, yang itu disesuaikan dengan kemampuan dari perusahaan," pengkasnya.

Dibandingkan dengan pekerja formal lainnya, pendapatan kurir dan driver ojol cenderung lebih rendah dan sangat bergantung pada jumlah orderan harian. Tidak adanya sistem gaji tetap membuat mereka harus bekerja lebih dari 8 jam sehari untuk mencapai pendapatan yang layak.

## RATA-RATA UPAH PER BULAN PERUSAHAAN EKSPEDISI & KURIR

Sumatera

3.470.536

Jawa Bali

3.746.700

Kalimantan

3.676.705

Sulawesi

3.265.700

Papua

2.198.532

Nasional

3.580.007

Perusahaan ojek online seperti Gojek dan Grab menyebut pengemudinya sebagai "mitra," sebuah istilah yang pertama kali dipopulerkan oleh Uber dan menjadi standar industri hingga saat ini. Dalam skema ini, driver dianggap sebagai wirausaha yang memiliki kebebasan mengatur jam kerja dan penghasilannya sendiri. Namun, status ini juga berarti mereka tidak mendapatkan hak-hak dasar pekerja, termasuk upah minimum, batasan jam kerja, dan tunjangan seperti THR.

Model kemitraan ini telah menjadi perdebatan di berbagai negara. Beberapa negara bahkan telah melarang praktik ini dan mengharuskan perusahaan platform untuk memperlakukan mitra sebagai karyawan dengan hak yang setara. (wid,ktn,rls,ist/dya)

# Pemkot Batu Kucurkan Rp 400 Juta Revitalisasi Pertanian Apel

**BATU** - Produksi apel di Kota Batu terus mengalami penurunan akibat berkurangnya lahan, usia tanaman yang menua, serta dampak perubahan iklim. Sebagai langkah antisipatif, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan-KP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 400 juta pada tahun 2025 ini untuk merevitalisasi lahan apel.

Program ini bertujuan mempertahankan apel sebagai ikon Kota Batu, serta sebagai komoditas unggulan dan meningkatkan kembali produktivitas petani yang terdampak.

Kepala Distan-KP Kota Batu, Heru Yulianto, mengungkapkan selain dari APBD Kota Batu, revitalisasi pertanian apel juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat. "Tahun lalu kami juga mendapatkan bantuan sekitar Rp 400-600 juta untuk mendukung sarana dan prasarana pertanian, termasuk penyediaan pupuk organik," ujar Heru, Senin (17/2/2025).

Heru menyampaikan, revitalisasi lahan apel ini mencakup tujuh lokasi utama yang mayoritas berada di

Kecamatan Bumiaji. Menurutnya, program ini difokuskan pada peremajaan pohon apel, perbaikan sistem budidaya, serta pengurangan ketergantungan petani terhadap pupuk kimia.

Lebih lanjut, berdasarkan data Distan-KP, produksi apel di Kota Batu mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada triwulan pertama 2020, produksi apel masih mencapai 72.274 kuintal dari 1.569.145 pohon yang ada. Namun, pada triwulan kedua tahun yang sama, jumlahnya merosot menjadi 43.652 kuintal dari 1.119.100 pohon.

Jumlah pohon produktif pun terus menyusut. Dari 602.190 pohon produktif pada awal 2020, hanya tersisa 335.717 pohon di triwulan kedua.

Kondisi ini diperparah dengan lahan perkebunan yang semakin berkurang. Heru menyebutkan, di tahun 2017, luas lahan apel di Kota Batu masih sekitar 1.800 hektare. Namun, pada 2020 luasnya menyusut menjadi 1.200 hektare, kemudian turun lagi menjadi 1.092 hektare pada

2022, dan hanya tersisa 1.044 hektare pada 2023.

"Apel itu kan merupakan ikon Kota Batu, jadi bagaimanapun harus tetap kita pertahankan. Kami juga dibantu teman-teman petani apel, banyak kok, walaupun mereka merasa rugi tetapi mereka tetap bertahan. Walaupun dulunya di 2017 itu lahan apel sekitar masih 1.800 an hektare, sekarang tinggal 900 an hektare saja," jelasnya.

Menurut Heru, menurunnya produktivitas apel tidak hanya terjadi di Kota Batu, tetapi juga di daerah lain seperti Pasuruan dan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Ia menyebut perubahan iklim sebagai salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi pertanian apel.



Wisata petik apel di Kota Batu. (dok. ist)

"Selain faktor cuaca, banyak lahan apel di Kota Batu yang sudah berusia lebih dari 30 tahun. Produktivitasnya pasti menurun. Di masa lalu, petani juga cenderung menggunakan pupuk kimia dan obat-obatan secara berlebihan, yang akhirnya merusak kesuburan tanah," jelasnya. (Santi/Dya)

# Pemkot Malang Bakal Perbaiki 30 Sekolah di 2025, Total Anggaran Rp 5 Miliar



Perbaikan sekolah rusak di Kota Malang. (Santi/Lenteratoday)

**MALANG** - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menargetkan perbaikan 30 sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) pada tahun 2025 ini. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 5 miliar, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, mengatakan program

perbaikan ini mencakup berbagai tingkat kerusakan, mulai dari ringan, sedang, hingga berat.

"Tahun ini ada 30 sekolah yang akan diperbaiki dengan anggaran Rp 5 miliar dari APBD. Banyak di antaranya yang mengalami kerusakan atap, dan itu menjadi prioritas utama kami. Kalau sudah berbicara soal keamanan, maka yang paling krusial adalah atap," ujar Suwarjana, Senin (17/2/2025).

Meskipun tak dapat merinci sekolah mana saja yang akan diperbaiki, Suwarjana menyebutkan sekolah-sekolah yang masuk dalam program perbaikan ini tersebar di 5 kecamatan Kota Malang. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan lebih aman dan nyaman bagi siswa serta tenaga

pendidik.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menegaskan perbaikan sekolah menjadi salah satu program prioritasnya. Ia menyebut sejak menjabat, ada 51 sekolah yang masuk dalam daftar prioritas perbaikan. Senada dengan Suwarjana, Iwan menghendaki di 2025 ini, sebanyak 30 sekolah ditargetkan mendapatkan perbaikan dengan anggaran Rp 5 miliar.

"Saat saya mulai menjabat, ada 51 sekolah yang menjadi prioritas saya. Tahun ini, kita punya target memperbaiki 30 sekolah dengan anggaran Rp 5 miliar dari APBD," kata Iwan, ditemui usai meninjau perbaikan di SDN Ketawanggede yang telah selesai dikerjakan.

Iwan juga menyampaikan, selain dana APBD, perbaikan sekolah juga dapat didukung oleh sumber pendanaan lain, seperti APBN, APBD provinsi, hingga dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP). Sebagai contoh, perbaikan di SDN Ketawanggede yang telah rampung pada akhir 2024 menggunakan dana

TSP sebesar Rp 611 juta.

"Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Perbaikan sekolah bisa didukung dari berbagai sumber, termasuk APBN, APBD provinsi, dan APBD kota. Kalau ada kondisi darurat, bisa dilakukan pembiayaan dari para pelaku usaha yang memiliki komitmen membantu Kota Malang," ujar Iwan. Ia menjelaskan perbaikan di SDN Ketawanggede dilakukan dengan menggunakan material berkualitas untuk ketahanan jangka panjang. Salah satunya dengan penggunaan kerangka baja ringan untuk menggantikan kusen kayu yang lebih rentan rusak.

"Anggaran TSP Rp 611 juta itu bukan nilai yang kecil, dan ini adalah bukti bahwa kita memprioritaskan pembangunan agar bangunan sekolah bisa bertahan lebih lama. Dengan kerangka baja ringan, bangunan bisa bertahan tanpa mengalami kerusakan hingga 10 atau 20 tahun ke depan," jelasnya.

Iwan juga menambahkan, sejak menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang, ia telah melakukan belanja masalah terkait kondisi sekolah di Kota Malang. (Santi/Dya)

# 1 Ton Bom Kiriman AS Tiba di Israel



Awak amunisi memindahkan bom Mark 84 (MK-84) seberat 2.000 pon pada tanggal 21 April 2010, di Pangkalan Angkatan Udara Ellsworth, SD.

**ISTANBUL** - Pengiriman bom berat buatan Amerika Serikat yang sempat tertahan oleh pemerintahan Joe Biden, akhirnya tiba di Israel.

Sebuah kapal yang mengangkut bom MK-84 seberat 2.000 pon atau hampir 1 ton menurunkan muatannya ke puluhan truk di Pelabuhan Ashdod untuk dibawa ke pangkalan-pangkalan udara Israel.

"Bom yang dikirim oleh pemerintahan (Presiden AS Donald) Trump itu, yang tiba di Israel malam ini, adalah aset penting bagi Angkatan Udara dan IDF (angkatan darat) dan menjadi bukti semakin kuatnya aliansi antara Israel dan Amerika Serikat," kata Israel Katz, Menteri Pertahanan Israel, dikutip pada Senin (17/2/2025).

Pemerintah AS di bawah Presiden Biden menunda pengiriman bom tersebut pada akhir Mei 2024 ketika Israel melancarkan serangan darat di Kota Rafah, Gaza Selatan.

Sejak Israel melancarkan perang di Jalur Gaza, Palestina, pada Oktober 2023, lebih dari 76.000 ton peralatan

militer telah dikirim ke Israel dengan 678 pesawat angkut dan 129 kapal, yang sebagian besar berasal dari AS, menurut Kementerian Pertahanan Israel.

Penggunaan bom berat oleh Israel dikaitkan dengan peristiwa pengeboman Rumah Sakit Baptis Al Ahli di Gaza yang menewaskan lebih dari 470 orang pada Oktober 2023.

Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, mulai diberlakukan di Gaza pada 19 Januari dan telah menghentikan perang yang telah menewaskan lebih dari 48.200 warga Palestina itu.

Diketahui selain bom MK-84, pemerintahan Trump juga menyetujui penjualan peralatan militer senilai lebih dari 7,4 miliar USD pada Februari 2025.

Peralatan militer tersebut mencakup bom, rudal, dan peralatan terkait lainnya untuk Israel.

MK-84 sendiri adalah bom berdaya ledak tinggi yang dirancang untuk menghancurkan bangunan besar dan

menyebabkan kerusakan dalam radius yang luas.

## Dukungan AS Gagal Nuklir Iran

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu meyakini negaranya, dengan dukungan sekutu dekatnya Amerika Serikat (AS), akan mampu menggagalkan ambisi nuklir Iran dan mengakhiri "agresi" Teheran di kawasan Timur Tengah.

Berbicara setelah bertemu Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio di Yerusalem, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (17/2/2025), Netanyahu mengungkapkan keduanya menjalani "pembicaraan yang sangat produktif" mengenai sejumlah isu, di mana "tidak ada yang lebih penting dari Iran".

"Israel dan Amerika bahu-membahu dalam melawan ancaman Iran," ucap Netanyahu dalam konferensi pers bersama Rubio.

"Kami sepakat bahwa para ayatollah tidak boleh memiliki senjata nuklir dan juga sepakat bahwa agresi Iran di kawasan harus dihentikan," ujarnya.

Rubio menambahkan bahwa Iran selalu berada di balik kelompok, aksi kekerasan dan aktivitas yang mengganggu stabilitas Timur Tengah.

"Di balik setiap kelompok teroris, di balik setiap tindak kekerasan, di balik setiap aktivitas yang mengganggu stabilitas, di balik segala sesuatu yang mengancam perdamaian dan stabilitas bagi jutaan orang, yang menyebut kawasan ini sebagai rumahnya, adalah Iran," sebutnya.

Lebih lanjut, Netanyahu menyebut Israel telah memberikan "pukulan hebat" kepada Iran sejak dimulainya perang di Jalur Gaza pada Oktober 2023.

Dia juga mengatakan bahwa dengan dukungan Presiden AS Donald Trump, Israel akan mampu menuntaskan "pekerjaan" dalam melawan Iran.

"Saya tidak meragukan bahwa kita bisa dan akan menuntaskan pekerjaan ini," tegas Netanyahu dalam pernyataannya.

Permusuhan Israel dan Iran berlangsung selama beberapa dekade melintasi sejarah perang diam-diam dan diwarnai serangan darat, laut, udara, bahkan dunia maya.

Teheran yang mengklaim pihaknya memperkaya uranium untuk tujuan damai, juga mendukung kelompok-kelompok di Timur Tengah yang menggambarkan diri mereka sebagai "Poros Perlawanan" terhadap pengaruh Israel dan AS di kawasan tersebut.

Poros Perlawanan itu tidak hanya mencakup Hamas yang berperang melawan Israel di Jalur Gaza, namun juga kelompok Hizbullah di Lebanon, kelompok Houthi di Yaman dan berbagai milisi bersenjata Syiah di wilayah Irak dan Suriah.

Selama 16 bulan perang berkecamuk di Jalur Gaza, Israel telah menewaskan para pemimpin tertinggi Hamas dan Hizbullah. Tel Aviv dan Teheran juga terlibat aksi saling serang beberapa waktu terakhir.

Berterima kasih kepada Rubio untuk "dukungan tegas" AS bagi kebijakan Israel di Jalur Gaza, Netanyahu menyebut Israel dan AS di bawah kepemimpinan Trump memiliki strategi yang sama di Jalur Gaza.

"Saya ingin meyakinkan semua orang yang kini mendengarkan kami, Presiden Trump dan saya sedang bekerja dengan kerja sama dan koordinasi penuh di antara kami," kata Netanyahu. (Anadolu, Reuters, Al Arabiya, ist/nei)



Trump dan Netanyahu juga pede normalisasi hubungan Israel dan Arab Saudi bakal segera terwujud. (AFP)

# Khasiat Jinten untuk Meningkatkan Kesehatan Tubuh



**JINTEN** biasanya digunakan sebagai bumbu masakan, namun ternyata tanaman ini yang berasal dari spesies *Cuminum cyminum* memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh.

Mencampurkan jinten ke dalam masakan atau mengonsumsi bijinya secara langsung disebut bisa membantu memberi manfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan hingga mengontrol kolesterol. Bahan masakan yang satu ini cukup familiar di Indonesia, dan sering digunakan untuk memasak. Jinten bisa memperkaya rasa masakan, terutama rasa pedas dan hangat.

Selain menambah kelezatan rasa makanan, apa saja manfaat kesehatan yang bisa didapat dari bahan yang satu ini? Temukan jawabannya di artikel berikut ini!

## Manfaat Kesehatan Jinten yang Perlu Diketahui

Menurut sejumlah penelitian, jinten ternyata memiliki sederet manfaat untuk kesehatan tubuh. Berikut ini beberapa di antaranya:

### Menjaga Kesehatan Pencernaan

Salah satu manfaat dari jinten adalah mengatasi gangguan pencernaan. Jika dikonsumsi secara rutin, bahan ini disebut bisa membantu meningkatkan dan menjaga kesehatan sistem

pencernaan. Bahan ini juga disebut bisa meningkatkan pelepasan empedu dari hati, sehingga bisa membantu mencerna lemak dan nutrisi tertentu di usus.

### Kaya Kandungan Zat Besi

Biji jinten kaya akan kandungan zat besi, sehingga baik untuk kesehatan tubuh. Satu sendok teh jinten disebut mengandung hingga 1,4 miligram zat besi. Asupan zat gizi dibutuhkan tubuh untuk membantu mencegah terjadinya anemia atau penyakit lain yang berkaitan dengan kekurangan darah.

### Antioksidan Alami

Jinten juga bisa berperan sebagai antioksidan alami karena mengandung banyak senyawa alami, seperti terpenes, fenol, flavonoid, dan alkaloid. Dengan mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan, risiko terjadinya kerusakan pada tubuh akibat radikal bebas bisa dihindari.

### Baik untuk Pengidap Diabetes

Pengidap diabetes mungkin bisa mempertimbangkan untuk "bersahabat" dengan jinten. Tanaman ini disebut bisa membantu mengontrol gula darah dan dapat melawan beberapa efek jangka panjang dari diabetes.

### Mengontrol Kolesterol

Selain gula darah, mengonsumsi jinten juga bisa membantu mengontrol kadar kolest

erol. Mengonsumsi tumbuhan ini dipercaya bisa membantu menurunkan kadar "kolesterol jahat" dan pada saat bersamaan akan meningkatkan kadar "kolesterol baik".

### Menurunkan Berat Badan

Sedang berusaha menurunkan berat badan? Mungkin jinten bisa menjadi jawaban! Ada studi klinis yang menemukan bahwa konsumsi suplemen atau makanan yang mengandung jinten bisa membantu menurunkan berat badan. Meski begitu, masih dibutuhkan studi lebih lanjut untuk membuktikan hal tersebut dan mencari tahu kaitan jinten dengan penurunan berat badan.

### Melawan Peradangan

Jinten ternyata memiliki sifat anti-inflamasi, sehingga bisa membantu melawan atau menghambat peradangan.

### Tanaman ini juga disebut memiliki sifat anti-bakteri.

Artinya, konsumsi jinten mungkin bisa membantu membunuh bakteri yang masuk ke dalam tubuh, misalnya melalui makanan. Dengan begitu, bakteri tersebut tidak bisa menyebabkan penyakit atau gangguan kesehatan. Jinten disebut bisa membunuh berbagai jenis bakteri yang masuk ke dalam tubuh, termasuk bakteri *e coli*.

### Manfaat Jinten sebagai Tanaman Obat Keluarga

Jinten telah lama dikenal dalam ramuan tradisional dan memiliki berbagai manfaat kesehatan

yang menjadikannya tanaman apotek hidup yang berharga:

### Membantu Pencernaan

Jinten dikenal efektif dalam mengatasi masalah pencernaan seperti perut kembung, sakit maag, dan gangguan pencernaan lainnya. Teh jinten dapat diminum untuk meredakan gejala-gejala tersebut.

### Meningkatkan Aliran Darah Lokal

Jinten dapat membantu meningkatkan aliran darah lokal, sehingga bermanfaat untuk mengatasi nyeri otot, pegal-pegal, dan masalah sirkulasi darah ringan. Minyak pijat yang mengandung minyak esensial jinten dapat digunakan untuk memijat area yang nyeri.

### Sifat Anti-inflamasi dan Antioksidan

Jinten mengandung senyawa aktif yang memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan. Senyawa ini dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel tubuh akibat radikal bebas dan meredakan peradangan.

### Potensi Antibakteri dan Antijamur

Minyak esensial jinten memiliki potensi sebagai antibakteri dan antijamur alami. Obat kumur alami yang mengandung ekstrak jinten dapat membantu menjaga kesehatan mulut dan gigi.

### Bahan Industri Farmasi dan Kosmetik

Ekstrak jinten dan minyak esensial jinten juga dimanfaatkan sebagai bahan industri farmasi dan kosmetik karena berbagai khasiatnya. Bentuk-Bentuk Jinten yang Tersedia di Pasaran jinten tersedia dalam berbagai bentuk jinten di pasaran, memudahkan konsumen untuk memilih sesuai kebutuhan dan preferensi. Biji Jinten Utuh Bentuk jinten yang paling umum adalah biji jinten utuh. Biji jinten dapat digunakan langsung sebagai bumbu masakan, disangrai untuk meningkatkan aroma, (nei,ist/dya)





# Bumi Masuk Fase Iklim Mengerikan, Waspadalah!

**DUA** penelitian terbaru tentang iklim menyatakan bahwa Bumi saat ini telah mencapai titik kritis pemanasan global 1,5 derajat Celsius, dan kemungkinan telah memasuki fase iklim baru yang sangat mengkhawatirkan.

Berdasarkan Perjanjian Paris 2015 tentang perubahan iklim, umat manusia di seluruh dunia saat ini sedang berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga pemanasan global tidak melebihi 1,5 derajat Celsius di atas rata-rata pra-industri. Pada 2024, suhu Bumi justru melalui batas tersebut.

Kenaikan suhu yang terjadi pada 2024 sebenarnya tak cukup untuk mengatakan bahwa iklim kita sudah melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, karena kenaikan suhu di bawah perjanjian tersebut diukur dalam beberapa dekade, bukan terjadi dalam jangka pendek.

Namun, dua studi yang dirilis baru-baru ini menggunakan ukuran berbeda. Keduanya meneliti data iklim historis untuk menentukan apakah tahun-tahun yang sangat panas di masa lalu merupakan tanda bahwa ambang batas pemanasan di masa mendatang akan terlampaui.

Hasil penelitian dua studi tersebut menyatakan bahwa rekor suhu terpanas yang terjadi pada 2024 bisa mengindikasikan Bumi telah melewati batas 1,5 derajat Celsius, dan akan menyebabkan kerusakan dahsyat pada kehidupan di masa depan. Jadi, bagaimana penelitian itu dilakukan?

Dalam studi yang terbit di Nature Climate Change dijelaskan, para peneliti dari Eropa dan Kanada mencoba menjawab dua pertanyaan dasar yang sama tentang: Apakah



pemanasan global selama setahun di atas 1,5 derajat Celsius merupakan tanda peringatan bahwa kita sudah melewati ambang batas Perjanjian Paris atau tidak?

Dua penelitian itu menggunakan observasi dan simulasi model iklim untuk menjawab pertanyaan ini, dengan pendekatan sedikit berbeda. Dalam studi yang dilakukan para peneliti di Eropa, mereka mengamati tren pemanasan historis, dan menemukan bahwa ketika suhu rata-rata Bumi mencapai ambang batas tertentu, periode 20 tahun berikutnya juga akan mencapai ambang batas tersebut.

Artinya, jika saat ini Bumi sudah mencapai pemanasan 1,5 derajat Celsius [meski cuma terjadi pada 2024], maka 20 tahun kemudian suhu rata-rata di Bumi akan mencapai 1,5 derajat Celsius.

Sementara dalam studi yang dilakukan oleh para peneliti di Kanada, mereka memuat data bulanan. Juni tahun 2024 adalah bulan ke-12

berturut-turut dengan suhu di atas level pemanasan 1,5 derajat Celsius. Peneliti menemukan, 12 bulan berturut-turut di atas ambang batas iklim menunjukkan bahwa ambang batas tersebut akan tercapai dalam jangka panjang.

Kedua studi juga menunjukkan, meski pengurangan emisi tetap dimulai dari sekarang, Bumi kemungkinan akan tetap melewati ambang batas 1,5 derajat Celsius.

## Manusia harus berubah

Mengingat temuan ini, apa yang dilakukan umat manusia saat ini dan selanjutnya akan menjadi penentu di masa depan. Selama beberapa dekade, ilmuwan iklim memperingatkan bahwa penggunaan bahan bakar fosil untuk energi telah melepaskan karbon dioksida dan gas ke atmosfer sehingga membuat Bumi semakin hangat.

Selain itu, emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia juga telah memperparah keadaan. Dalam sebuah

laporan pada 1990, emisi karbon dioksida tahunan dunia meningkat sekitar 50 persen. Saat ini, hampir seluruh negara di Bumi sedang berusaha mengurangi emisi untuk memperbaiki iklim di masa depan, tapi upaya ini tampaknya belum dilakukan dengan baik.

Studi menyebut, jika pemanasan global ingin berakhir, maka emisi gas rumah kaca harus dihentikan hingga mencapai nol. Bahkan, kalau pun manusia berhasil menurunkan emisi ke titik nol, beberapa aspek iklim akan terus berubah akibat pemanasan skala regional dalam beberapa abad ke depan, terutama di lautan karena sulit diperbaiki.

Dampak buruk perubahan iklim sebenarnya sudah terasa di seluruh dunia. Kerusakannya akan lebih parah bagi generasi mendatang. Australia telah mengalami pemanasan rata-rata 1,5 derajat Celsius sejak 1910.

Ekosistem seperti Great Barrier Reef (kumpulan karang terbesar di dunia) sudah merasakan dampak dari pemanasan ini. Lautan semakin panas dan suhu permukaannya meningkat, menghantam garis pantai dan mengancam kehidupan laut.

Kebakaran hutan dan cuaca ekstrem, terutama gelombang panas semakin sering terjadi dengan intensitas yang semakin parah. Hal ini memberikan tekanan pada alam, manusia, dan ekosistem.

Bagaimanapun kita harus segera beradaptasi dengan pemanasan global, baik yang saat ini terjadi maupun di masa depan. Di antara rangkaian perubahan yang dibutuhkan, negara-negara kaya harus mendukung negara miskin yang akan menanggung dampak buruk iklim paling parah. (nei,ist/dya)



HARIAN  
**LENERA**  
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"  
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI  
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)  
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)  
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENERA TODAY  
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)  
download edisi digital pada web  
[www.lenteratoday.com](http://www.lenteratoday.com)  
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS  
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO, (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I MOJOKERTO: NUR HIDAYAH I LAMONGAN: L HANDI I BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA I KEDIRI: GATOT SUNARKO I JOMBANG : SUTONO I PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO : IMAN SANTOSO I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO ( SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I TRENGGALEK: TINA W I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

**MEDIA TERVERIFIKASI**

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH  
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

# Orang Cerdas Juga Bisa Memiliki Kebiasaan Buruk, Ini Contohnya

**KECERDASAN** sering dianggap sebagai simbol kemampuan berpikir tajam, kreativitas tinggi, dan kemampuan memecahkan masalah kompleks.

Namun, di balik kelebihan tersebut, ternyata orang cerdas juga memiliki kebiasaan buruk yang menarik untuk diketahui. Mari kita simak bersama kebiasaan buruk apa saja yang sering dimiliki oleh orang-orang cerdas!

Orang cerdas biasanya memiliki cara berpikir yang unik dan tidak biasa. Mereka cenderung lebih analitis, lebih suka berpikir mendalam, dan sering kali terjebak dalam pemikiran yang kompleks.

Hal ini membuat mereka mampu melihat berbagai sisi dari suatu masalah dan menciptakan solusi yang inovatif. Namun, cara berpikir yang dalam ini juga bisa menjadi bumerang, karena sering kali mereka terjebak dalam kebiasaan buruk yang justru menghambat produktivitas dan interaksi sosial mereka.

Selain itu, orang cerdas juga sering kali memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka seringkali menghabiskan waktu untuk belajar dan mengeksplorasi hal-hal baru. Sayangnya, keinginan untuk memahami segalanya ini bisa membuat mereka merasa cemas atau bahkan stres. Jadi, meskipun mereka terlihat memiliki banyak kelebihan, ada sisi gelap yang perlu kita ketahui.

## Menunda-nunda Pekerjaan

Menunda-nunda pekerjaan atau procrastination adalah salah satu kebiasaan buruk yang umum di kalangan orang cerdas. Mereka sering kali menunggu momen yang tepat untuk mengekspresikan kreativitas mereka.

Hal ini bisa jadi disebabkan oleh keyakinan bahwa mereka akan lebih produktif jika mengerjakan tugas di saat-saat terakhir. Namun, kebiasaan ini bisa mengakibatkan stres dan hasil kerja yang tidak optimal.

## Melamun

Melamun sering kali dianggap sebagai tanda kurang fokus, tetapi bagi orang cerdas, melamun bisa menjadi cara untuk membersihkan pikiran. Saat melamun, mereka dapat memicu pemikiran yang lebih kreatif dan menemukan solusi untuk masalah yang sedang dihadapi. Meskipun terlihat negatif, melamun bisa menjadi alat yang berguna untuk mengatasi stres.

## Tidak Rapi atau Berantakan

Kebiasaan berantakan tidak selalu berarti bahwa seseorang tidak terorganisir. Banyak orang cerdas yang lebih fokus pada pencapaian tujuan daripada menjaga kebersihan dan kerapian di sekitar mereka. Ketidakrapian ini sering kali mencerminkan cara berpikir yang mendalam dan intens, sehingga mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktu pada hal-hal yang lebih penting.

## Sulit Berkomunikasi Ringan

Bagi orang cerdas, obrolan ringan sering kali terasa melelahkan dan tidak menarik. Mereka lebih suka membahas topik yang dalam dan kompleks. Hal ini bisa membuat mereka terkesan kurang ramah atau sulit bergaul, padahal mereka hanya ingin berbicara tentang hal-hal yang lebih berarti.

## Cemas Berlebihan

Orang cerdas cenderung lebih sensitif terhadap lingkungan sekitar. Mereka sering kali memikirkan banyak hal secara mendalam, sehingga lebih mudah merasa cemas. Kecemasan ini bisa berhubungan dengan berbagai hal, mulai dari pekerjaan hingga hubungan sosial, dan bisa menjadi penghalang bagi mereka untuk menikmati hidup.

## Sulit Menerima Kegagalan

Bagi orang cerdas, kegagalan bisa menjadi hal yang sangat menyakitkan. Mereka memiliki standar yang tinggi terhadap diri sendiri dan sering kali merasa frustrasi ketika tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini bisa menghambat kemajuan mereka dan membuat mereka ragu untuk mencoba lagi.

## Mengabaikan Kecerdasan Emosional

Terakhir, orang cerdas sering kali terlalu fokus pada kecerdasan intelektual dan mengabaikan pentingnya kecerdasan emosional. Mereka mungkin kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain dan memahami perasaan orang di sekitar mereka. Kecerdasan emosional sangat penting dalam

membangun hubungan yang sehat dan produktif.

## Mengkritik Diri Sendiri

Banyak orang mungkin berpikir bahwa orang-orang cerdas itu pasti percaya diri. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa orang-orang cerdas tidak demikian.

Dalam sebuah studi tahun 1999 dari Cornell University, para ilmuwan menemukan bahwa orang-orang yang tidak kompeten tidak dapat mengenali ketidakmampuan mereka sendiri, sehingga menyebabkan penilaian diri meningkat.

Hal itu dikarenakan mereka tahu seberapa banyak pengetahuan yang ada di luar sana. Alih-alih terlalu percaya diri, mereka cenderung mengkritik diri sendiri.

## Suka Bicara Sendiri

Selain suka mengkritik diri sendiri, orang-orang cerdas juga kerap berbicara sendiri, baik di dalam hati maupun tulisan. Hal ini dikemukakan dari penelitian University of Wisconsin and the University of Pennsylvania. Kebiasaan ini tanpa disadari bisa meningkatkan daya ingat dan memperkuat ketajaman kerja otak. Orang-orang yang suka bicara sendiri tentu sering dianggap gila, padahal bisa jadi itu justru kebiasaan yang jenius. (nei,ist/dya)



**#IndonesiaGelap ... (dari Hal 1)**

**BADAN** Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025). Berbagai kota di Indonesia juga menggelar aksi serupa.

Aksi ini merupakan ekspresi kekecewaan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto mengatakan ada tujuh tuntutan mahasiswa dalam unjuk rasa 'Indonesia Gelap'. Salah satunya, meminta Prabowo mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang dinilai merugikan masyarakat.

"Menuntut Presiden mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025 yang merugikan rakyat," kata Herianto, Senin (17/1/2025).

Selain itu, BEM SI menuntut transparansi status pembangunan dan transparansi keseluruhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BEM SI juga menolak revisi UU Minerba dan dwifungsi TNI, serta meminta RUU Perampasan Aset disahkan.

Unjuk rasa ini juga diikuti BEM Universitas Indonesia (UI). Dalamuntutannya, BEM UI meminta Prabowo mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang untuk menjaga independensi akademik.

Selanjutnya, BEM UI meminta MBG dievaluasi total dan mengeluarkan program unggulan Prabowo ini dari anggaran pendidikan. Kemudian, BEM UI mendesak agar Inpres pemangkasan anggaran dicabut.

"Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Begitu banyak kebijakan ugul-ugalan nirsustansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut," dikutip dari akun Instagram @bemui\_official.

Sebelumnya, gelombang aksi Indonesia Gelap yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menarik perhatian publik. Gerakan mahasiswa ini membawa sejumlah tuntutan kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Media sosial turut diramaikan dengan tagar aksi Indonesia Gelap yang mencapai 43,8 ribu postingan di platform X. Gerakan ini menjadi sorotan publik karena mengusung simbol Garuda dengan latar hitam, mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin jauh dari cita-cita kemakmuran.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto mengungkapkan bahwa aksi Indonesia Gelap akan berlangsung selama tiga hari hingga Rabu (19/2/2025) dengan melibatkan sekitar 5.000 massa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Tuntutan pertama yang disuarakan mahasiswa adalah pencabutan Inpres No. 1 tahun 2025 karena dinilai menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. BEM UI melihat kebijakan ini sebagai langkah yang berpotensi merugikan berbagai sektor vital dalam kehidupan masyarakat.

Para aktivis mahasiswa menilai bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak mengorbankan sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Mereka menuntut adanya kajian ulang terhadap kebijakan pemangkasan anggaran dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.

Dalam pandangan mahasiswa, transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan anggaran juga menjadi hal yang crucial. Mereka menuntut pemerintah untuk lebih terbuka dalam menjelaskan dasar pertimbangan dan dampak dari kebijakan pemangkasan anggaran ini.

Para demonstran menekankan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan tidak memberatkan masyarakat, terutama kelompok yang rentan secara ekonomi.

Di Jatim kerusuhan terjadi hingga aparat kepolisian bahkan membubarkan massa dengan water cannon.

Saat keriuhan terjadi, beberapa mahasiswa peserta aksi diamankan oleh aparat kepolisian dan dibawa ke dalam gedung Indrapura. Hal itu dikatakan oleh perwakilan BEM UIN Sunan Ampel Surabaya, Wendy Septian.

"Kami melihat sendiri bahwasannya lima orang, teman kami dibawa sama anggota ke dalam. Kami meminta dikeluarkan teman kami, tetapi mereka bilang tidak akan dikeluarkan," tutur Wendy ditemui setelah aksi.

Lima mahasiswa yang diamankan aparat kepolisian, lanjut Wendy, yakni tiga mahasiswa berasal dari Universitas Negeri Surabaya, satu mahasiswa dari Universitas Airlangga, dan satu mahasiswa dari UIN Sunan Ampel Surabaya.

Dihubungi secara terpisah, Kabag Ops Polrestabes Surabaya, AKBP Wibowo membantah sekaligus menegaskan bahwa pihaknya tidak mengamankan lima peserta aksi, seperti yang dialami mahasiswa.

"Saya tegaskan tidak ada yang diamankan. Semuanya dari mahasiswa, boleh dikonfirmasi apa yang tadi disampaikan isu-isu yang menurut mereka diamankan dan sebagainya. Saya pastikan gak ada," tuturnya di lokasi aksi.

Kendati demikian, Wibowo tidak menampik bahwa aksi demonstrasi yang digelar hari ini sempat mengalami ricuh, seperti dorong-dorongan hingga adu mulut antara massa aksi dan aparat kepolisian.

"Tadi awalnya mengalami lancar kemudian berikutnya ada sedikit miskomunikasi. Namun demikian,

alhamdulillah keseluruhan kegiatan pengamanan ini lancar semuanya," imbuh AKBP Wibowo.

Ketika ditanya apakah klaim dari mahasiswa terkait penangkapan lima peserta aksi adalah keliru, Wibowo tidak memberikan jawaban secara gamblang. Yang jelas, ia menegaskan tidak ada yang diamankan.

"Saya tidak menyampaikan benar atau salah tapi saya memastikan tidak ada yang diamankan. Anggota kami aman, Mahasiswa juga aman semuanya. Semua sudah kita komunikasikan dan untuk mahasiswa pulang," tandasnya.

Sebelumnya, keriuhan mulai terjadi setelah kurang lebih satu jam massa aksi menunggu, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Muhammad Musyafak Rouf tidak kunjung menemui. Mereka kemudian membakar ban di tengah aksi.

Asap hitam pekat membimbing tinggi di sekitar aksi. Aparat kepolisian lantas berupaya untuk memadamkan kobaran api dengan APAR (Alat Pemadam Api Ringan). Cekcok antara aparat kepolisian dan mahasiswa pun tak terhindarkan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan, tidak ada pemotongan terhadap biaya operasional perguruan tinggi, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, maupun beasiswa. Ia menyebut arahan Presiden Prabowo tegas menyampaikan kebijakan pemotongan anggaran pendidikan tidak boleh dilakukan.

"Beliau sampaikan juga kepada teman-teman yang dari kampus bahwa presiden tegas sekali, biaya operasional perguruan tinggi, KIP Kuliah, dan beasiswa sama sekali enggak boleh dikurangi," ujar Hasan di Istana Negara, Jakarta Pusat.

D e m o d e n g a n t e m a #IndonesiaGelap ini salah satuuntutannya adalah menolak efisiensi anggaran pendidikan.

Terkait dengan isu pemotongan anggaran pendidikan yang beredar di masyarakat, Hasan memastikan informasi tersebut tidak benar.

Presiden Prabowo, katanya, menegaskan pemotongan terhadap beasiswa, KIP Kuliah, atau biaya operasional perguruan tinggi tidak boleh dilakukan dalam bentuk apa pun.

"Dan presiden bilang 'ini enggak boleh dilakukan'," ucap dia.

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya pertemuan antara Presiden, Kantor Staf Presiden (KSP), atau Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dengan perwakilan demonstran,

Hasan mengaku belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut. "Saya belum tahu info itu. Tadi enggak dibahas soal itu," tandasnya.

Di media sosial berdasarkan pantauan, tagar Indonesia Gelap yang viral di X merupakan slogan yang digunakan oleh warganet untuk menyoroti berbagai permasalahan dalam pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden

Gibran Rakabuming Raka.

"#IndonesiaGelap bukan karena tak ada cahaya, tapi karena mereka yang berkuasa memilih menutup mata. Kita melihat, kita tau, tapi suara kita terus diredam," tulis akun @dia\*\*\*

"#IndonesiaGelap: habis gelap, terbitlah perlawanan! Saat kondisi hidup layak yang seharusnya adalah hak kita bahkan menjadi sulit dicapai, kita berhak melawan dan mengingatkan negara akan kewajibannya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kita," tulis akun @amn\*\*\*

"Kita diboongin, guys. Efisiensi anggaran ternyata buat bayarin Danantara dan anggaran buat Makan Bergizi Gratis itu lebih kecil dari Danantara ini. Rezim bang\*at emang. Ngorbanin kebutuhan dan hak kelas menengah ke bawah demi proyek2 pro-korporat," tulis akun @tha\*\*\*

**#KaburAjaDulu**

Media sosial belakangan jugadiramaikan tren "kabur aja dulu", frasa yang merepresentasikan keinginan untuk meninggalkan berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia.

Ungkapan ini lahir dari keresahan masyarakat atas berbagai isi nasional, mulai dari ketidakpastian ekonomi, lapangan pekerjaan yang semakin sulit, kebijakan yang blunder, dan persoalan penegakan hukum yang masih melanda negeri ini.

Bagi sebagian orang, "kabur aja dulu" adalah bentuk eskapisme. Sementara bagi yang lain, ini adalah bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap para penyelenggara negara.

Ungkapan "kabur aja dulu" awalnya muncul dalam konteks guyonan netizen di media sosial. Namun, semakin lama, maknanya berkembang menjadi sindiran yang lebih serius terhadap kondisi sosial-politik belakangan ini.

Ungkapan ini telah bertransformasi menjadi simbol perlawanan terhadap sistem birokrasi yang dianggap lamban, tidak akuntabel, dan kerap kali gagal memenuhi harapan masyarakat.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons tagar Kabur Aja Dulu yang viral di media sosial. Hasan mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat yang ingin merantau. Namun, dia meminta, masyarakat harus menaati prosedur yang berlaku di negara tujuan.

"Harus taat prosedur. Supaya tidak jadi pendatang haram. Kalau orang mau merantau tidak boleh dilarang," kata Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dia mengatakan, merantau merupakan tindakan yang bagus. Dia pun mengingatkan masyarakat yang ingin merantau harus mempunyai kemampuan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya mengatakan, tagar itu sebuah bentuk aspirasi masyarakat. Hal itu, kata Yassierli, menjadi tantangan bagi pemerintah. (wid, rls, adin, ant, kum/dya)

# Minyakita Makin Mahal, Kemendag: Pengecer Nakal, Ubah Jadi Curah



Harga Minyakita terus melambung di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp15.700 per liter. Ist

**JAKARTA**-Harga minyak goreng, termasuk Minyakita, masih menunjukkan tren kenaikan di berbagai wilayah di Indonesia jelang Ramadan 2025 ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga rata-rata nasional untuk minyak goreng premium saat ini mencapai Rp21.545 per liter, minyak goreng curah Rp17.620 per liter, dan Minyakita Rp17.411 per liter. Angka ini masih di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp15.700 per liter untuk Minyakita

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengendus adanya oknum pengecer yang membeli minyak goreng rakyat Minyakita dan menjualnya kembali dalam bentuk minyak curah.

Staf Ahli Kemendag Tommy Andana mengatakan bahwa banyak ditemukan pengecer yang menjual Minyakita ke pengecer lain sehingga harga minyak goreng rakyat melambung, imbas rantai distribusinya yang panjang. "Ternyata banyak juga yang pengecer menjual [Minyakita] kepada pengecernya, sehingga rantainya menjadi panjang dan harganya menjadi naik," ungkap Tommy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di YouTube Kemendagri, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Dia menyebut, fenomena ini terjadi saat harga minyak goreng curah dan minyak premium merangkak naik. Maka dari itu, Kemendag meminta kepada para pelaku usaha, baik produsen maupun distributor agar mengawasi rantai distribusi penjualan Minyakita.

"Tren ini ternyata juga sedikit banyak ini dipengaruhi oleh misalnya pada saat terjadi kenaikan harga minyak goreng curah, harga minyak premium. Minyakita terbawa imbasnya karena ada juga yang sedikit "mereka" [penjual] membeli Minyakita lalu dia jual secara curah," bebernya.

Namun demikian, Tommy mengaku bahwa sederet dugaan itu sudah Kemendag dalam melalui pengawasan secara intensif. Sehingga, lanjut dia, diharapkan harga Minyakita tetap sesuai dengan HET.

Perlu diketahui, Minyakita merupakan minyak goreng kemasan yang merupakan hasil Domestic Market Obligation (DMO) dari para produsen di dalam negeri, terutama eksportir kelapa sawit dan turunannya. Tommy menuturkan bahwa setiap produsen yang melakukan DMO

akan mendapatkan insentif hak ekspor produk turunan kelapa sawit.

Sementara itu, mengacu data Simirah yang diolah Kemendag per 14 Februari 2025, realisasi DMO pada Januari 2025 sebesar 163.212 ton dan Februari 2025 adalah 62.803 ton, seluruhnya dalam bentuk Minyakita.

Sebelumnya dalam catatan, Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono menduga rembesan Minyakita dijual dalam bentuk minyak curah, yang menyebabkan harga Minyakita melambung di atas HET.

Kala itu, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di YouTube Kemendagri, Selasa (3/12/2024), Edy menuturkan bahwa berdasarkan temuan dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) pada 2023, terdapat kasus Minyakita yang dibuka dan dijual sebagai minyak curah. "Jadi ada kasus di mana Minyakita dibuka kemasannya, dijual sebagai minyak curah karena harganya harga minyak curah lebih mahal. Apalagi sekarang minyak curah harganya tidak

kendalikan. Ini adalah temuan dari KPPU," ungkap Edy. Penyebab ini yang diduga harga Minyakita berada di atas HET, sebab persediaan Minyakita berkurang karena sebagian beralih ke minyak curah.

### Siapkan Operasi Pasar Pangan

Menjelang perayaan Ramadan dan Lebaran 2025, pemerintah akan menggelar operasi pasar di berbagai daerah untuk menekan potensi lonjakan harga pangan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme operasi pasar, termasuk rencana volume komoditas yang didistribusikan, penentuan harga berbagai komoditas pada operasi pasar, hingga penentuan lokasi pelaksanaan operasi pasar.

"Kita akan melakukan operasi pasar besar, khususnya komoditas daging, gula pasir, minyak goreng, dan seterusnya. Hari ini kita masih rapatkan dan keputusan terakhir itu pada 19 Februari 2025," usai memimpin Rakor Pengendalian Harga

Pangan Jelang Ramadan dan Lebaran 2025, di Kantor Kementerian Pertanian, Senin (17/2/2025).

Amran memastikan pemerintah akan lebih cermat dalam menentukan harga komoditas pada operasi pasar ataupun harga eceran tertinggi (HET) komoditas secara umum yang akan diumumkan pada 19 Februari 2025 nanti.

Untuk saat ini, pihaknya memastikan stok sembilan komoditas pangan mencukupi untuk menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) ini.

"Beras aman, itu yang paling penting, beras aman karena ini kontribusinya kepada inflasi. Daging, bawang, insya Allah kita aman, stok aman. Intinya stok kita siapkan sekarang, kita sudah pantau, kita sudah rapat koordinasi tadi, stok aman, jumlahnya cukup," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menambahkan akan memberikan dukungan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan.

Pihaknya akan memulai koordinasi dengan Dinas Perdagangan agar kegiatan operasi pasar menjangkau lapisan masyarakat di daerah.

"Atas arahan Bapak Menteri Pertanian, kami akan langsung berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan PD Pasar, terutama di daerah yang mengalami indikasi kenaikan agar bisa dikendalikan dan turun operasi pasar di sana dengan komoditas yang sudah ditentukan dan juga dengan titik-titik yang telah ditentukan berdasarkan laporan," jelasnya. (wid, bis, rls, ant/dya)

## 5 Provinsi dengan Harga Minyak Goreng Termahal / Liter (per 17/2/2025)

Sumber: Pihak BI



## HARGA MINYAK GORENG SAWIT (Rata-rata Nasional/Liter)

